

Laporan Pemantauan Konflik di Aceh

1 – 31 Oktober 2006

World Bank/DSF

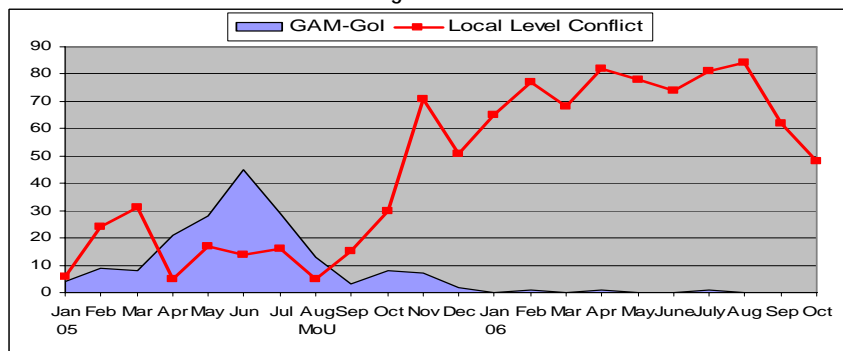


Sebagai bagian dari program dukungan untuk proses perdamaian, Program Konflik dan Pengembangan Masyarakat di Bank Dunia Jakarta menggunakan metodologi pemetaan konflik melalui surat kabar untuk merekam dan mengkategorikan semua laporan tentang insiden konflik di Aceh yang diberitakan di dua surat kabar daerah (Serambi dan Aceh Kita). Program ini mempublikasikan perkembangan per bulan, sejauh mungkin didukung oleh kunjungan ke lapangan, yang terangkum dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.¹

Tidak ada konflik antara RI dan GAM yang dilaporkan pada bulan Oktober. Akan tetapi ketegangan antara RI dan GAM berdampak terhadap masyarakat Aceh dalam bentuk konflik tingkat lokal. Selain itu, dua laporan baru mengindikasikan bahwa ada kenaikan dalam tingkat kejahatan kekerasan (*violent crime*) sejak penandatanganan MoU. Penurunan pada tingkat konflik RI-GAM menggambarkan peralihan dari konflik menuju kejahatan. Hal ini menggarisbawahi bahwa masih banyak yang perlu dilakukan dalam program reintegrasi dan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan mantan kombatan. Hingga akhir Oktober, tidak ada insiden konflik serius yang berhubungan dengan Pilkada dan tidak ada tanda yang mengkhawatirkan bahwa konflik atau kekerasan akan meluas.² Walaupun demikian, ada ketegangan laten dan kemungkinan terjadinya insiden terpisah (*isolated incident*). Tren mengkhawatirkan yang berhubungan dengan reintegrasi ini, serta peningkatan kompetisi yang berhubungan dengan Pilkada, menunjukkan bahwa beberapa bulan ke depan adalah masa kritis dalam proses perdamaian.

Lebih positif, konflik tingkat lokal makin menurun, meskipun kemungkinan ini terjadi karena bulan Ramadhan. Walaupun demikian, jumlah insiden kekerasan sedikit meningkat menjadi sembilan. Bantuan tetap menjadi isu terbesar dalam 20 dari 48 konflik; salah satu keluhan utama adalah karena lamanya proses penyaluran bantuan. Laporan ini juga memberitakan tindakan main hakim sendiri – banyak di antaranya yang berhubungan dengan aksi penegak hukum – dan siklus konflik yang berulang terkait dengan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak).

Gambar 1: Konflik GAM-RI dan konflik tingkat lokal berdasarkan bulan



¹ Terdapat keterbatasan dalam menggunakan surat kabar untuk memetakan konflik, untuk analisis dan metodologi lebih lanjut lihat: Patrick Barron dan Joanne Sharpe (2005). "Counting Conflict: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia", *Indonesian Social Development Paper No. 7*. Jakarta: World Bank. Laporan itu, serta laporan hasil pemantauan bulanan, dapat juga dilihat di: www.conflictanddevelopment.org. Dataset tersedia bagi yang membutuhkan, dengan menghubungi Blair Palmer di: bpalmer@worldbank.org.

² Perlu dicatat bahwa laporan ini tidak memasukkan insiden baru-baru ini (22 November 2006) di mana Humam dari kandidat gubernur Humam-Hasbi diserang di Bireuen.

Tidak ada insiden GAM-RI yang dilaporkan di bulan Oktober

Sejak awal tahun 2006, hanya ada tiga insiden GAM-RI yang terekam, dan tidak ada yang dilaporkan di bulan Oktober 2006 (lihat Gambar 1). Namun, beberapa insiden yang tidak melibatkan pasukan bersenjata dari GAM dan RI tetap menggambarkan ketegangan yang serupa. Salah satu contoh adalah tindakan main hakim sendiri pada bulan September, di mana korban meninggal karena luka-luka di bulan Oktober.

- *Keuchik* (kepala desa) Limau Purut, di Kluet Utara, Aceh Selatan, meninggal pada tanggal 29 Oktober karena dipukuli oleh sekitar 50 orang pada tanggal 18 September. Kelompok tersebut juga menyerang *keuchik* lain (yang dapat melarikan diri), lalu mereka mengamuk di rumah kedua *keuchik*. Serambi melaporkan bahwa penyerang “diduga sebagai mantan anggota GAM”, dan motif penyerangan adalah karena *keuchik* mengisi laporan pemerintah Kabupaten dengan menggunakan kata “separatis” untuk merujuk kepada mantan GAM.

Ketegangan GAM-RI sebelumnya tetap berdampak terhadap masyarakat Aceh, meskipun dalam bentuk yang berbeda – melalui berbagai jenis konflik tingkat lokal, dan sepertinya juga melalui kejahatan.

Ada indikasi bahwa kejahatan meningkat

Dua laporan baru-baru ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan pada tingkat kejahatan kekerasan (*violent crime*) sejak penandatanganan MoU. Hal ini bersama penurunan pada tingkat konflik RI-GAM menggambarkan sebuah peralihan dari konflik menuju kejahatan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pada tingkat kejahatan kekerasan ini terpusat di tempat-tempat di mana GAM paling aktif dahulu. Mungkin saja kelanjutan pengangguran mantan kombatan di daerah-daerah tersebut berdampak pada tingkat kejahatan kekerasan.

Pada tanggal 18 Oktober, the Jakarta Post melaporkan data dari Kontras-Aceh, yang menunjukkan bahwa tingkat kejahatan kekerasan meningkat, dengan jumlah 70 kasus kejahatan bersenjata sejak penandatanganan MoU pada bulan Agustus tahun lalu. Koalisi HAM juga mengumpulkan data mengenai kejahatan dan pelanggaran HAM, dengan menggunakan media massa serta laporan dari pos bantuan hukum dan HAM di enam kabupaten. Data mereka menunjukkan bahwa walaupun pelanggaran HAM menurun sejak MoU, kejahatan meningkat secara drastis, dengan angka tertinggi di Pidie, yang dulunya adalah tempat kekuatan GAM. Menurut Koalisi HAM, alasan peningkatan tingkat kejahatan adalah ketidakpuasan GAM/KPA dengan program bantuan, pertikaian dalam GAM/KPA, dan masih maraknya senjata ilegal.

Peningkatan pada tingkat kejahatan di tempat-tempat kekuatan GAM mengindikasikan bahwa kebutuhan-kebutuhan mantan kombatan belum dipenuhi dengan memuaskan. Reintegrasi yang tepat memerlukan perhatian kepada baik kebutuhan ekonomi individu (dengan memastikan bahwa ada mata pencaharian yang berkelanjutan) maupun kebutuhan sosial dan psikososial (lihat Kotak 1). Hal tersebut mengingatkan bahwa yang diperlukan adalah strategi reintegrasi yang terpadu.

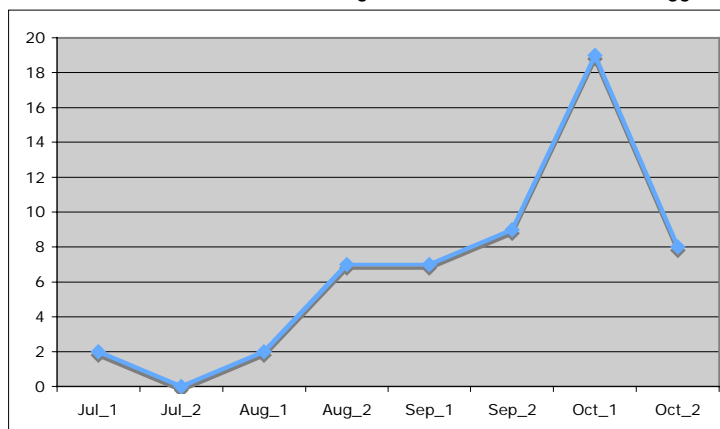
Kotak 1: Penyembuhan Sosial

Tiga puluh lima mantan kombatan di Pidie telah mendokumentasikan kehidupan sehari-hari melalui kamera dan pena, sebagai bagian dari proyek Peace Diary (dilaksanakan oleh Aceh Cultural Institute dan Bank Dunia). Dengan menyediakan ruang kreatif untuk menyalurkan perasaan mantan kombatan, kegiatan ini juga berupaya untuk membantu proses reintegrasi dan membangun kepercayaan antara GAM yang kembali dan masyarakat penerima. Setelah pelatihan awal, peserta bertemu setiap dua minggu sekali untuk menunjukkan ‘buku harian damai’ mereka kepada peserta lain serta masyarakat. Foto dan tulisan peserta menggambarkan dampak-dampak fisik dan sosial dari konflik, dengan mengangkat topik seperti rumah dan masjid yang terbakar, korban konflik dengan penyakit kronis, anak-anak yatim-piatu karena konflik, dan topik lainnya. Karya mereka akan dipamerkan di Pidie pada tanggal 25-27 November dan di Banda Aceh pada tanggal 2-5 Desember.

Insiden terkait dengan Pilkada meningkat lalu menurun di bulan Oktober

Hingga saat ini, tidak ada insiden konflik serius terkait dengan Pilkada dan tidak ada bukti yang mengkhawatirkan bahwa konflik atau kekerasan akan meluas. Di bulan Oktober, jumlah insiden terkait dengan Pilkada meningkat hingga 19 di pertengahan pertama, lalu jatuh secara drastis menjadi 8 di pertengahan kedua (lihat Gambar 2). Serupa dengan jumlah konflik tingkat lokal, kemungkinan hal ini terjadi karena bulan suci Ramadhan dan masa liburan koran Serambi (lihat di bawah).

Gambar 2: Insiden konflik terkait dengan Pilkada berdasarkan dwi-minggu



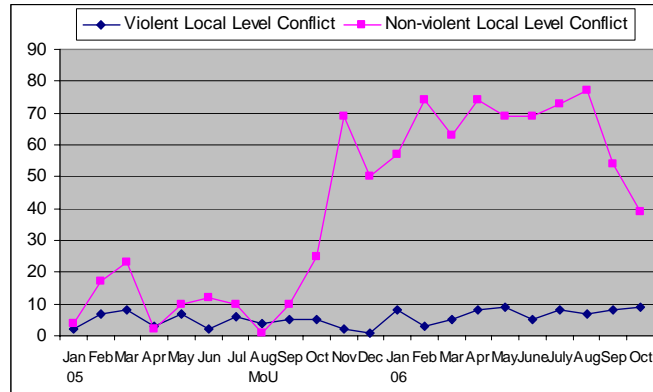
Sumber: dataset Pilkada UNDP/WB

Walaupun begitu, ada ketegangan laten dan kemungkinan terjadinya insiden terpisah (*isolated incident*). Contohnya, kompetisi Pilkada di Bener Meriah memperparah perpecahan yang berkaitan dengan suku, GAM dan kelompok anti-separatis. Ketegangan meningkat di antara kandidat-kandidat dari elemen masyarakat tersebut. Insiden konflik tanpa kekerasan menunjukkan bahwa perselisihan terjadi di antara tiga kelompok utama: antara partai/individu dan negara; di dalam partai politik; dan antara lembaga-lembaga pemerintah. Perselisihan tersebut mengisyaratkan kelemahan institusional tertentu. Keterlambatan dan kekurangan dana pada institusi terkait dengan Pilkada, terutama KIP (Komisi Independen Pemilihan) dan Panwas (Panitia Pengawas), mengakibatkan institusi tersebut memfokus pada kegiatan logistik dan administratif dan mengabaikan pembentukan mekanisme dan hubungan untuk mencegah dan menangani konflik. Selain itu, kekurangan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadikan masyarakat pemilih tahu akan Pilkada tetapi sangat kurang informasi mengenai bagaimana prosedurnya. Kelemahan-kelemahan tersebut sepertinya tidak akan membatalkan pelaksanaan Pilkada, tetapi dapat mengurangi mutu dan legitimasi dari Pilkada jika masalah yang lebih serius terjadi.

Konflik tingkat lokal makin menurun

Terjadi penurunan pesat pada konflik tingkat lokal dalam dua bulan terakhir; kami menemukan 48 insiden konflik tingkat lokal yang dilaporkan pada bulan Oktober (lihat Gambar 1 di atas). Jumlah demonstrasi dan insiden terkait dengan korupsi juga menurun di bulan ini. Ada beberapa penjelasan untuk hal ini. Pertama, bulan Oktober (hingga tanggal 24) bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Kegagalan dalam mengendalikan emosi mengakibatkan batal puasa, maka boleh jadi sebagian keluhan-keluhan yang ada pada bulan ini diselesaikan dengan baik atau ditunda. Kedua, ada kemungkinan bahwa liputan konflik tingkat lokal yang menurun. Serambi menghentikan publikasinya dari tanggal 24 hingga 26 (mengurangi dataset kami sekitar 10%). Selain itu, liputan ekstensif Pilkada bisa jadi menurunkan liputan konflik tingkat lokal. Meskipun penjelasan tersebut hanya berlaku untuk bulan Oktober, dan oleh karena itu mengindikasikan tingkat konflik lokal akan meningkat lagi bulan depan, perlu dicatat bahwa penurunan yang konsisten dapat terlihat dalam dua bulan terakhir.

Gambar 3: Konflik tingkat lokal dengan kekerasan dan tanpa kekerasan berdasarkan bulan



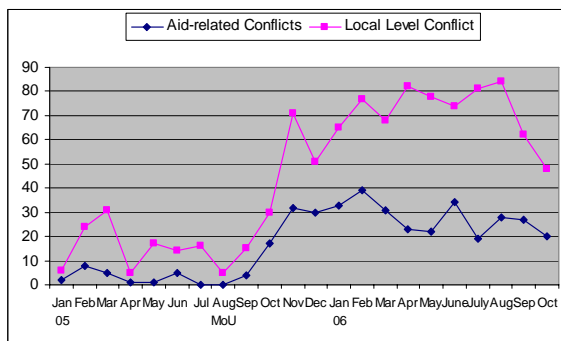
Insiden kekerasan dalam konflik tingkat lokal sedikit meningkat menjadi sembilan kasus yang terlapor (lihat Gambar 3). Insiden tersebut termasuk dua kasus pelemparan batu terhadap kendaraan umum dan beberapa serangan pengerusakan terhadap gedung atau bangunan lain. Beberapa peristiwa kekerasan lainnya – penculikan terkait dengan bantuan pemerintah, dan dua insiden “main hakim sendiri” – dijelaskan di halaman-halaman berikut.

Konflik terkait dengan bantuan tetap tinggi

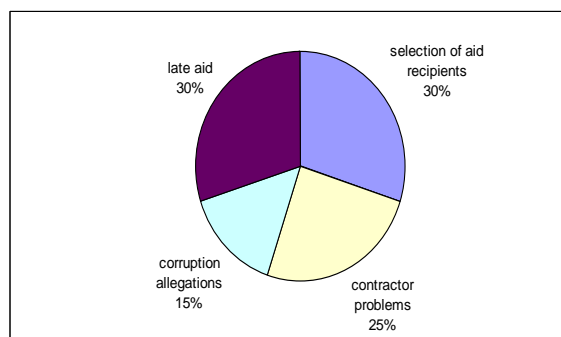
Bantuan (meliputi bantuan tsunami, reintegrasi pasca-konflik, dan program pemerintah lainnya, seperti subsidi BBM) menjadi faktor dalam 20 dari 48 insiden konflik tingkat lokal yang tercatat bulan ini (lihat Gambar 4). Dalam laporan bulan lalu, kami menyoroti empat masalah yang umumnya adalah ciri-ciri dari konflik terkait dengan bantuan. Tiga dari masalah tersebut tetap menjadi yang utama bulan ini: pemilihan penerima bantuan, masalah dengan kontraktor, dan dugaan korupsi. Permasalahan tanah dalam proyek bantuan tidak terlalu menonjol dalam berita, meskipun pastinya masih tetap ada (seperti yang terjadi bulan ini, sengketa tanah yang tidak terkait dengan bantuan, yang melibatkan pembakaran pagar dari tanah yang diperebutkan). Bulan ini, 30% konflik terkait dengan bantuan didasari dengan keluhan mengenai lambatnya penyaluran bantuan (lihat Gambar 5).

Semua kecuali satu dari konflik ‘bantuan lambat’ terkait dengan bantuan tsunami. Keterlambatan penyaluran bantuan tetap akan menjadi sumber ketegangan yang meluas. Meskipun implementasi dari proyek yang dirancang dengan baik memerlukan waktu, dan masyarakat kadang memiliki harapan yang kurang realistis, ketegangan tersebut perlu dihadapi dengan lebih efektif. Jadwal implementasi yang transparan dan disosialisasikan kepada penerima bantuan, juga dengan penjelasan yang jelas tentang keterlambatan penyaluran, akan membantu mengurangi ketegangan tersebut.

Gambar 4: Konflik terkait bantuan berdasarkan bulan



Gambar 5: Rincian konflik terkait bantuan, Oktober



Demonstrasi menurun

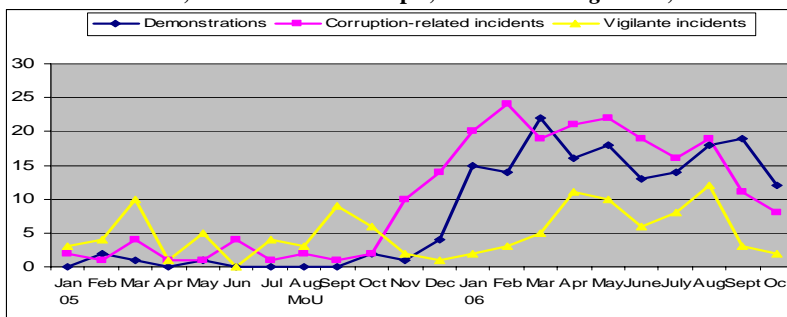
Jumlah demonstrasi menurun hingga 12 kasus di bulan Oktober (lihat Gambar 6), tetapi kemungkinan penurunan ini terkait dengan bulan puasa dan bisa kembali meningkat di bulan November. Tujuh demonstrasi memprotes mengenai bantuan – dan lima di antaranya memprotes secara khusus mengenai penanganan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM. Empat demonstrasi menuntut gaji atau tunjangan yang belum dibayar oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab; hanya ada satu demonstrasi mengenai masalah hukum (lihat Kotak 2). Hanya satu demonstrasi yang melibatkan kekerasan, mengakibatkan kerusakan pada sebuah kantor kecamatan.

Kasus “main hakim sendiri” muncul lagi namun jumlah insiden ‘vigilante’ menurun³

Di bulan Oktober serangan “main hakim sendiri” kembali terjadi, dengan dua insiden yang tercatat (lihat Gambar 6). Penjelasan di bawah ini juga meliputi kasus pemukulan dari bulan September yang tidak dilaporkan bulan lalu (insiden ini disebutkan dalam berita mengenai sebuah demonstrasi bulan ini).⁴

- *17 Oktober, Syamtalira Bayu, Aceh Utara.* Serambi melaporkan bahwa penduduk di desa Beunot mengeroyok dua laki-laki yang ditemukan sedang berpasangan dengan perempuan di panti asuhan. Setelah keroyokannya, penduduk membawa dua pasangan tersebut ke kantor polisi. Salah satu korban adalah anggota TNI. Kapolres Lhokseumawe menyatakan bahwa dia akan menyelidiki kedua kasus, baik pelanggaran *khalwat* (pasangan lawan jenis ditemukan dalam keadaan yang mencurigakan) maupun tindakan keroyokan.
- *25 Oktober, Banda Aceh.* Serambi melaporkan bahwa seorang satpam di kantor Dinas Sosial Banda Aceh memasang bendera Indonesia dalam keadaan terbalik. Malam itu ia dipukuli secara membabi buta oleh seorang polisi, dan meninggal dua hari kemudian. Saksi melaporkan bahwa bukan korban yang memasang bendera, tetapi satpam lainnya. Kasus ini mendapatkan pemberitaan yang lumayan besar, sebagai contoh kegagalan disiplin polisi dan sebuah ujian apakah mereka bisa bebas dari hukum. Seorang anggota polisi berusia 21 tahun telah ditahan selagi gugatan sedang diproses.
- *Pertengahan September, Kaway XVI, Aceh Barat.* Menurut Serambi, bulan lalu seorang polisi dikeroyok setelah menyita kayu yang telah ditebang oleh penduduk. Korban mengajukan pengaduan, dan polisi memanggil beberapa penduduk desa untuk dimintai keterangan. Pada tanggal 2 Oktober, ratusan orang datang ke DPRD untuk memprotes pemanggilan tersebut, dan menyatakan bahwa ada 60-70 orang yang memukuli anggota polisi itu, bukan hanya beberapa. Mereka juga mengaku jengkel karena anggota polisi itu memeras mereka berkait kayu yang ditebang (lihat Kotak 2).

Gambar 6: Demonstrasi, insiden terkait korupsi, dan insiden ‘vigilante’, berdasarkan bulan



³ Kami membedakan antara kasus ‘vigilante’ secara umum (seperti pemukulan antara geng, keroyokan, dan lain sebagainya) dan kasus “main hakim sendiri”, yang adalah kasus *vigilante* yang secara khusus dimaksudkan untuk menghukum sebuah pelanggaran moral. Bulan lalu ada tiga kasus *vigilante* tetapi tidak ada yang bersifat “main hakim sendiri”.

⁴ Kami telah menambah peristiwa ini dalam database, hingga figur bulan September sedikit berubah.

Kasus “main hakim sendiri” bulan ini menyoroti peranan penegak hukum. Kasus *khalwat* melibatkan tentara, pembunuhan “bendera terbalik” diduga dilakukan oleh anggota polisi, dan kasus Kaway XVI melibatkan polisi yang dikeroyok karena pemerasan. Kasus-kasus tersebut mengingatkan bahwa jika polisi ingin memulihkan reputasi publiknya, perlu menghentikan pelanggaran HAM dan mengurangi pemerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Di sisi lain, terdapatnya dua kasus di mana masyarakat mengeroyok penegak hukum menunjukkan bahwa rasa takut masyarakat terhadap pembalasan dendam oleh aparat keamanan sudah berkurang.

Kotak 2: Jeratan Tantangan

Kasus Kaway XVI menunjukkan bahwa berbagai tantangan di Aceh saling berhubungan. Kapolres Aceh Barat menyatakan bahwa ada indikasi penebangan kayu yang ilegal. Hal ini terkait dengan kurangnya mata pencaharian dan korupsi dalam penegakan hukum – karena anggota polisinya diduga terlibat dalam upaya pemerasan. Penduduk kemudian mengeroyok polisi sebagai pembalasan dari upaya pemerasan tersebut. Ketika polisi berusaha menyelidiki, terjadi sebuah demonstrasi besar. Ada kaitan antara pengangguran, penebangan liar, pemerasan, tindakan main hakim sendiri, dan penegakan hukum yang setengah-setengah. Hal ini mengingatkan bahwa sangat sulit untuk menyelesaikan satu masalah tanpa menghadapi juga masalah-masalah yang lain.

“Subsidi BBM” menyulut konflik

Sembilan insiden konflik bulan ini terjadi berkaitan dengan BLT, subsidi BBM untuk keluarga miskin. Protes pada umumnya terjadi dari masyarakat yang belum menerima pembayaran, atau berhubungan dengan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan. Ada lima demonstrasi (satu yang melibatkan kekerasan), tiga pengaduan, dan satu penculikan. Serambi melaporkan bahwa pada tanggal 19 Oktober seorang karyawan kantor pos Geudong di Meurah Mulia, Aceh Utara, diculik oleh penduduk yang marah karena merasa ditipu. Korban diduga mengumpulkan kartu BLT dari 128 penduduk dan menjanjikan akan lebih cepat mencairkan subsidiya. Beberapa hari kemudian ia belum juga mencairkan dananya, dan pemerintah saat itu sedang menyalurkan pembayaran BLT di daerah tersebut. Hal itu menyebabkan masyarakat tidak dapat menerima BLT karena kartu telah diserahkan kepada petugas kantor pos. Mereka sadar telah tertipu, lalu menculiknya, dan akhirnya menyerahkannya kepada polisi untuk diperiksa.

Meskipun nilai BLT hanya Rp. 300.000, program ini berkelanjutan, maka terdapat berbagai sengketa mengenai siapa yang layak menerima bantuan, dan berbagai upaya untuk mengorupsi dana BLT. Pembayaran dilakukan kira-kira setiap tiga bulan, dan konflik mengenai BLT mengikuti siklus tiga bulanan (lihat Gambar 7). Prosedur bagi pemilihan penerima bantuan seharusnya lebih transparan dan disosialisasikan dengan baik. Dugaan korupsi juga seharusnya diselesaikan secara cepat dan tuntas. Beberapa penipuan juga begitu transparan. Pada tanggal 2 Oktober, Serambi melaporkan bahwa penduduk di Pantonlabu, Aceh Utara, mengeluhkan bahwa pembayaran mereka dipotong Rp. 5.000. Setiap orang diminta menandatangani surat yang menyatakan bahwa Rp. 5.000 yang dipotong adalah “ucapan terima kasih kepada presiden”. Seorang penduduk menjelaskan, “kami tidak bisa berbuat banyak. Apabila kami tidak membayar, maka kami tidak akan menerima BLT selanjutnya.”

Gambar 7: Konflik subsidi BBM berdasarkan bulan

